
Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa

KESEHATAN LINGKUNGAN SUATU PENGANTAR

Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Ed 4

Membangun Pariwisata dari Bawah

Hak rakyat mengontrol negara

Which Way Forward

ICETLAWBE 2020

Pengembangan Sistem Pertanian Urban Ramah Lingkungan Berbasis Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga

LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN

Pengelolaan pulau-pulau kecil

Menepis Kabut Halimun

studi di Kabupaten Jayapura dan Manokwari

Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA

Ekonomi Lokal

Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik

Membangun Desa Wisata Bagian 3: Pengelolaan Desa Wisata

Environmental Law Enforcement

Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi dan Dampak Kunjungan Wisata

Dimensi paradigma politik hukum pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil : Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

"People, Forests, and Policymaking in Indonesia"

Pemberdayaan dan Kolaborasi

PERENCANAAN DESA TERPADU: Modal Sosial dan Perubahan Lahan

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Rangkaian Bunga Rampai Pengelolaan Sumberdaya Alam di Halimun

Penyusunan Model dan Uji Coba Instrumen Indeks di Kabupaten Klungkung,

Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Boalemo

Kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah: studi kasus di

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan

Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan Ekosistem Kota Menuju Kota Ekologis

Rumah untuk seluruh rakyat

Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur

MEMBANGUN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) Berbasis Partisipasi Masyarakat

Globalisasi dan Neoliberalisme: Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi

Indonesia

Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat dalam Pengembangan Ekowisata

Pengelolaan Hutan Lestari

PERIZINAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Pengelolaan Hutan Untuk Kemakmuran Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Di Maluku
Problematika Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu
Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan

*Dampak
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pengelolaan
Desa*

*Downloaded from
ecobankpayservices.ecobank.com
by guest*

CAMERON HERRERA

KESEHATAN LINGKUNGAN

SUATU PENGANTAR PT

Penerbit IPB Press

Pengelolaan hutan secara partisipatif adalah langkah bijak dalam memberdayakan masyarakat desa hutan sebagai pengelola hutan langsung di tingkat tapak. Tingginya ketergantungan masyarakat dan negara pada sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan membutuhkan pengelolaan yang tepat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Sebagai operator kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki peranan penting dan tidak jarang mengalami banyak tantangan dalam menjalankan tupoksinya. Selain itu, keterbatasan yang dimiliki KPH memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO

maupun masyarakat adat dan lokal. Salah satu kebijakan pengelolaan hutan tersebut adalah Perhutanan Sosial (PS), yang merupakan salah satu wujud dari perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari konsep timber base forest management menjadi community base forest management dengan melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan hutan untuk tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, PS juga merupakan upaya untuk pemulihan kawasan kritis yang mampu memitigasi perubahan iklim melalui konsep agroforestri dalam implementasi rehabilitasi hutan dan lahan yang menjadi bagian reforestasi. Pengelolaan hutan secara partisipatif menuju terwujudnya KPH hijau sejalan dengan apa yang ditargetkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Buku ini

menyajikan catatan panjang kegiatan dalam kerangka kerjasama antara Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) Regional Project Component 3: "Facilitating the Participatory Planning of community-Based Forest Management Using Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Technologies in Forest Resource Management in the Philippines, Indonesia and Thailand" dengan dengan Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kegiatan kolaborasi AFoCO – BLI-KLHK selama periode lima tahun (2015 – 2020) bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan informasi dalam melaksanakan pendampingan dan fasilitasi program pengelolaan hutan secara partisipatif di tingkat tapak khususnya di tiga pilot site pada 3 KPH di Indonesia yaitu KPHL Sijunjung, KPHL Batuteги dan KPHL Sikka. Pengelolaan Hutan Secara

Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak* Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasiona Ed 4 Kencana Implementasi program Perhutanan Sosial (PS) penuh dengan tantangan dan perdebatan tentang apakah dan bagaimana PS di Indonesia dapat memberikan kepastian hak tenurial bagi masyarakat dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan. Khusus untuk wilayah Maluku dan Papua yang memiliki sejarah penguasaan lahan hutan yang cukup beragam dan karakteristik sosial budaya yang spesifik akan memberikan dampak yang berbeda dari implementasi PS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan role model PS di Maluku dan Papua yang mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut didukung dengan kajian tentang: (1) Implementasi skema PS di Maluku dan Papua; (2) Pengelolaan kawasan, kelembagaan dan usaha PS; (3) Dampak

implementasi PS terhadap masyarakat dan hutan; (4) Sistem tenurial lahan hutan dalam pengelolaan PS dan (5) Akses legal dan potensi konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penentuan Lokasi dilakukan secara purposive yang mewakili keempat provinsi dalam wilayah kerja BPSKL Maluku Papua dan mewakili implementasi skema PS. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara rumah tangga, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara secara mendalam dengan informan kunci. Analisis diskriptif kualitatif dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber dan teknik untuk mendapatkan analisis yang kredibel. Selanjutnya dilakukan sintesis terhadap hasil kajian untuk menentukan role model PS yang terdapat di wilayah Maluku Papua. Hasil Kajian menunjukkan bahwa Implementasi PS keempat lokasi studi mencakup skema HD, HKm, dan HTR sudah mendapatkan SK Gubernur/Walikota dan Menteri Kehutanan sejak pengelolaan dilakukan oleh BPDAS dan BP2HP. Selanjutnya BPSKL Wilayah Maluku Papua melakukan penataan

lokasi dan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat serta pemberian bantuan alat ekonomi. Pengelolaan kawasan pada keempat lokasi studi mencakup kawasan HP, HPT dan HL dengan melakukan pengelolaan lahan agroforestry dengan penanaman berbagai jenis tanaman pertanian dan kehutanan. Pengembangan kapasitas kelembagaan PS yang telah dilakukan seperti kegiatan pelatihan, sekolah lapang dan studi banding ke lokasi-lokasi PS yang sudah maju. BPSKL Maluku Papua telah membentuk 45 unit KUPS dengan bantuan alat ekonomi produktif sebanyak 18 unit. Dampak social yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya implementasi PS masih terbatas pada perubahan pengetahuan tentang akses yang diberikan secara legal bagi masyarakat untuk mengusahakan lahan hutan. Lahan hutan yang dimaksudkan adalah lahan yang secara de facto telah diusahakan oleh masyarakat secara turun temurun dan penguasaannya dibedakan berdasarkan hak adat yang berlaku.

Kesesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku dalam pengelolaan hutan khususnya nilai kebersamaan masih belum dintegrasikan sehingga muncul kecemburuan bagi anggota yang tidak dilibatkan dalam kelompok PS. Dampak ekonomi masih terbatas pada pengetahuan tentang bantuan alat ekonomi dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu penting untuk menambah pendapatan masyarakat. Produk yang diusahakan dari adanya pelatihan penggunaan produk ekonomi masih terbatas pada saat pendampingan kegiatan tersebut, selanjutnya masyarakat tidak dapat mengusahakan karena berbagai kendala teknis maupun modal dan pemasaran. Pendapatan yang diperoleh kelompok PS pada saat studi lebih pada beragam mata pencaharian yang diusahakan setiap keluarga. Dampak ekologi untuk kelestarian hutan dengan adanya implementasi PS, bagi masyarakat hal tersebut sudah diupayakan dengan berbagai kearifan local dan pengetahuan secara turun temurun untuk menjaga hutan. Hutan

merupakan sumber penghidupan bahkan dianggap sebagai “air susu ibu” sehingga persoalan kelestarian hutan bagi masyarakat pada setiap lokasi studi menjadi hal yang sangat penting, bahkan dengan adanya implementasi PS bagi mereka sangat baik sekali karena mereka sendiri yang akan menjaga hutan tersebut. Implementasi PS juga bermanfaat membatasi pihak lain untuk mengambil hasil hutan tersebut selain dari masyarakat sendiri yang telah memiliki hak legal. Sistem tenurial masyarakat sangat penting diperhatikan dalam implementasi PS karena terdapat penguasaan secara adat yang dapat mendukung program PS. Pengaturan tenurial lahan secara adat memungkinkan masyarakat bertanggungjawab menjaga lahan hutan agar lestari dan manfaat hutan dapat dirasakan secara langsung dan sepenuhnya bagi yang mengelola. Berkaitan dengan hal tersebut maka akses legal yang diberikan harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku didalam kelompok masyarakat sehingga tidak ada konflik yang

terjadi antar marga di dalam kelompok maupun konflik antar anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok PS dan yang tidak. Role model yang ditemukan pada keempat lokasi kajian lebih pada pembelajaran untuk tindakan antisipasi dan motivasi dalam keberlanjutan pengelolaan PS pasca ijin. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang diberikan kepada mereka. Masyarakat dengan kesadaran dan tanggungjawab sendiri akan terlibat dalam peluang ekonomi tersebut, walaupun sifatnya sementara, karena ada beragam mata pencaharian yang diusahakan oleh setiap keluarga. Modal social masyarakat di desa kajian mencakup kepercayaan dan kerjasama serta jaringan sangat berpotensi diperhatikan dalam implementasi program PS. Pengetahuan tentang kelestarian hutan telah berkembang dalam masyarakat, sehingga program PS untuk kelestarian hutan memberikan motivasi

bagi masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut. kebutuhan pendamping telah menghasilkan dinamika kelompok PS yang mendorong pelaksanaan program sampai pada tahap memperoleh manfaat usaha PS. Kajian dampak PS di Maluku dan Papua pada tahap awal merupakan dasar yang dapat dijadikan pembelajaran untuk implementasi program PS selanjutnya. Dukungan berbagai pihak khususnya pada masing-masing lokasi studi (kabupaten/kota) menjadi penting untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dengan menjaga kelestarian hutan. BPSKL Maluku Papua menjadi pihak utama untuk merealisasikan program PS memiliki tanggungjawab sampai pada produk yang dihasilkan dan luasan hutan tetap terjaga, dengan mengupayakan kemandirian masyarakat untuk keberlanjutan program PS.

Membangun Pariwisata dari Bawah Penerbit Lakeisha

Terminologi desa wisata (tourism village) jarang ditemukan di dalam literature. Para ahli

mengakui kebingungan mengartikannya dengan mengaitkan sejumlah aktivitas pariwisata yang berkembang di daerah pedesaan (Parekh, 2010; Page dan Getz, 1997:4). Desa wisata dapat diartikan sebagai desa secara sengaja dibangun - atau secara alami memiliki kemampuan - untuk menarik kunjungan wisatawan karena ketersediaan potensi atraksi alam dan budayanya. Konsep yang digunakan perencana pembangunan pariwisata pedesaan di Indonesia adalah bahwa desa wisata merupakan "bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi setempat" (Republik Indonesia, 2009) Definisi operasional ini digunakan sebagai basis kebijakan pengembangan pariwisata pedesaan di Indonesia. Oleh sebab itu di dalam tulisan ini terminologi desa wisata dimaknai sama dengan pariwisata pedesaan (rural tourism). Dibandingkan dengan konsep desa wisata, konsep pariwisata pedesaan sendiri lebih sering ditemukan di dalam berbagai publikasi ilmiah (Youell, 1996;Page

dan Getz, 1997;Kuvacic, et.al, 2010; Chuang, 2010). Namun demikian secara substansial tidak terlihat perbedaan yang signifikan antar keduanya. Chuang (2010:1313) dan Kuvacic, et.al, (2010: 1648) merangkum pendapat beberapa ahli dan lalu memaknai pariwisata perdesaan dengan menunjukkan suatu lingkungan geografis tempat terjadi/berlangsungnya aktivitas pariwisata dan karakteristik asli berupa budaya tradisional, budaya pertanian, lanskap pedalaman dan gaya hidup sederhana. Konteks ruang (space) menjadi penting untuk memosisikan aktivitas dan implikasi perkembangan pariwisata perdesaan. Ahli lain mengartikan "rural tourism is one of the forms of sustainable development that through promoting productivity in rural zones, brings about employment, income distribution, preservation of village environment and lokal culture, raising host community's participation and presenting appreciate methods to conform beliefs and traditional values with new circumstances" Youell (1996: 136). Rural tourism

adalah bentuk alternative pariwisata yang mampu menyumbang perubahan-perubahan positif terhadap sumberdaya social, ekonomi dan budaya di daerah perdesaaan.

Hak rakyat mengontrol negara Merdeka Kreasi Group

Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah

tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group. Which Way Forward PT Kanisius Negara dan/atau pemerintah serta stake holders serta pemangku kepentingan lainnya dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan pertanahan, juda termasuk di dalamnya pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa dalam pelaksanaan proses pembentukannya harus mengikuti dan berdasarkan paradigma politik hukum yang tepat, yaitu berdasarkan : seluruh nilai-nilai sebagaimana tercantum dalam pancasila yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (philosophy of paradigm), berdasarkan norma hukum yang diamanatkan dalam konstitusi negara yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(constitutional of paradigm), dan juga harus berdasarkan prinsip Indonesia adalah Negara hukum _juridical of paradigm), agar atas hasil produk pengaturan hukum dimaksud tidak terjadi keguncangan paradigma (shocks of paradigm) yang berkesesuaian dan tepat. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan penulis kendala yang bersifat umum dan politis ini, secara yuridis formal tidak terjadinya intervensi dalam bentuk apapun terutama dalam perspektif kepentingan politis dari pihak penguasa yang melakukan intervensi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu dalam hal ini tidak terkecuali yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan hukum di bidang konsolidasi tanah yang akan di laksanakan oleh negara dan/atau pemerintah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berkenaan untuk melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya terutama ditujuakn kepada pemerintah dalam hal ini kepada aparat

penyelenggara konsolidasi tanah yaitu pihak kantor pertanahan kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan teori sociological jurisprudence, yaitu teori roscoe pound, yang terkenal dengan teorinya, bahwa: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Atas saran ini, dimaksudkan penulis bahwa sikap dan attitude dari aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut harus memahami dan sekaligus mengedepankan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Dalam pada itu, disarankan juga oleh penulis untuk mendukung kelancaran implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya juga harus mengedepankan teori aplikasi (applied theory), yaitu teori pragmatic legal realism, yang dikemukakan oleh salah seorang pelopor dalam teori pragmatic legal realism ini adalah Friedman. Bagian penting dalam teori ini adalah suatu gerakan (movement) terutama yang

berhubungan dalam cara berpikir tentang hukum. Artinya, saran ini sangat berguna dalam menegakkan semua produk pengaturan hukum berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, tentu dalam pelaksanaan harus disesuaikan dengan jiwa rakyat (volkgeist) dan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dalam pelaksanaannya harus didukung yang berkesesuaian dan bersinergi dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam rezim otonomi daerah. Sejalan dengan saran ini, dimaksudkan penulis bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, agar segera proaktif untuk melakukan langkah kebijakan dengan segera membuat dan sekaligus mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan pengaturan hukum mengenai struktur kelembagaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan tugas pokok,

fungsi dan kewenangannya di bidang agraria-pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan segala bentuk koordinasi teknis dengan pihak Walikota/Bupati dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. ICETLAWBE 2020 Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lanskap produktif perkotaan mengembangkan lanskap perkotaan dengan mengoptimalkan fungsi produktif tanaman (terutama tanaman yang dapat dimakan/edible plant dan memenuhi fungsi kebutuhan hidup manusia lainnya secara ekologi, sosial, dan ekonomi), dan layanan ekosistem kota dengan membentuk ruang hijau sehingga kota dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman, sehat, dan indah. Komponen biotik ekosistem: manusia, tanaman, dan satwa, dapat menjadikan kota sebagai habitat dalam keselarasan keanekaragaman hayati (biodiversity) dengan lingkungan abiotiknya.

Kajian lanskap produktif perkotaan dalam buku ini mengaitkan kajian penghijauan dan pekarangan perkotaan, konservasi, perencanaan lingkungan, dan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan ekosistem kota menuju kota ekologis.

Pembahasan objek lanskap, makna produktif, dan aspek-aspek perkotaan diulas serta dikaji mendalam dari berbagai perspektif, baik berdasarkan pengalaman dan bidang keahlian penulis. Mulai dari pemahaman awal, teori dan penelitian terkait, hubungan dan keterkaitan lanskap - ekosistem - ekologi, eksplorasi ide - konsep dan desain serta penyajian hasil penelitian. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari tim peneliti "Pengembangan Lanskap Produktif Perkotaan untuk Kota Yogyakarta" dari Universitas Gadjah Mada. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata utama di Indonesia sangat relevan menjadi lokasi penelitian. Tim peneliti sendiri berasal dari beberapa latar pendidikan, yaitu Budidaya Pertanian (Lanskap, Hortikultura), Konservasi (Pariwisata Alam, Kehutanan),

Arsitektur (Permukiman Ekologis), dan Sosial Ekonomi Pertanian (Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian). Secara komprehensif, bacaan ini sangat menarik dan dapat menjadi tambahan pengetahuan berkualitas untuk semua kalangan dari berbagai bidang ilmu.

Pengembangan Sistem Pertanian Urban Ramah Lingkungan Berbasis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

European Alliance for Innovation Indonesia contains some of Asia's most biodiverse and threatened forests. The challenges result from both long-term management problems and the political, social, and economic turmoil of the past few years. The contributors to *Which Way Forward?* explore recent events in Indonesia, while focusing on what can be done differently to counter the destruction of forests due to asset-stripping, corruption, and the absence of government authority. Contributors to the book include anthropologists, economists, foresters, geographers, human ecologists, and policy analysts. Their concerns include the effects of government policies on

people living in forests, the impact of the economic crisis on small farmers, links between corporate debt and the forest sector, and the fires of the late 1990s. By analyzing the nations dramatic circumstances, they hope to demonstrate how Indonesia as well as other developing countries might handle their challenges to protect biodiversity and other resources, meet human needs, and deal with political change. The book includes an afterword by Emil Salim, former Indonesian Minister of State for Population and the Environment and former president of the Governing Council of the United Nations Environment Programme. A copublication of Resources for the Future and the Center for International Forestry Research (CIFOR) and the Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS). LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN Universitas Brawijaya Press Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Otonomi Daerah di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sebagai upaya untuk mengkaji isu-isu politik lokal, khususnya

desentralisasi fiskal asimetri, yang berjudul Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di Aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan karena memiliki skema pengelolaan keuangan yang berbeda dari daerah otonomi umum lainnya. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus dan istimewa ini belum optimal untuk memberikan efek yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan dari Indeks Ratio Gininya justru terjadi kesenjangan yang cukup tinggi sejak adanya dana otsus dan dana istimewa ini. Akar permasalahannya adalah di dalam implementasi dana otsus dan istimewa masih memberikan peluang adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana dikarenakan belum adanya master plan dan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, bunga rampai ini memandang penting untuk mengkaji

lebih mendalam masalah politik kebijakan pengelolaan dana otsus dan istimewa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas pengelolaan dana otsus dan istimewa. Bunga rampai ini juga secara khusus memaparkan aspek politik sekaligus aspek administrasinya. Selain itu hasil kajian dari bunga rampai ini juga merupakan hasil studi kualitatif melalui penelitian lapangan dan FGD, serta penelusuran dokumen-dokumen penting yang relevan. Melalui bunga rampai ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang luas baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan para stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan tujuan esensial otonomi, otonomi khusus dan istimewa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara substantif. Pengelolaan pulau-pulau kecil UGM PRESS Indonesia adalah negara dengan intensitas bencana alam yang tinggi disebabkan oleh kondisi geografis dan geologis. Berbagai bencana alam yang terjadi, seperti

banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, puting beliung dan letusan gunung api. Menyikapi kejadian bencana alam itu, Kementerian Sosial menyelenggarakan program pengurangan risiko bencana, yaitu Kampung Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana dan Kawasan Siaga Bencana. Program-program tersebut dirahkan pada kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam. Penelitian ini memfokuskan pada peranan Kawasan Siaga Bencana (KwSB) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam di Kabupaten Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Kulon Progo, Malang dan Bone Bolango. Di enam lokasi penelitian, peranan KwSB belum optimal karena pada umumnya belum ada legalitas, tidak ada dana operasional, mispersepsi tokoh dan warga masyarakat, dan kurangnya dukungan/pelibatan masyarakat. Disarankan KwSB dapat dilanjutkan sebagai wilayah siaga bencana, bukan sebagai lembaga/forum koordinatif lembaga/lembaga lokal

dalam penanggulangan bencana alam. KwSB sebagai wilayah kerja dari KSB, Tagana dan kelompok/lembagalembaga dan OPD dalam penanggulangan bencana alam di daerah. Kepada KSB dan Tagana perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut, baik oleh Kementerian Sosial maupun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Menepis Kabut

Halimun Program Studi Manajemen Hutan PPs UNPATTI
Perencanaan Desa Terpadu adalah suatu strategi yang tengah menjadi fokus utama untuk meningkatkan perkembangan kawasan perdesaan. Untuk itu, strategi pengembangan perdesaan perlu direncanakan dengan pendekatan-pendekatan tertentu untuk dapat mencapai hasil yang baik. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi pembaca khususnya akademisi dan pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan perdesaan.
studi di Kabupaten Jayapura dan Manokwari
Deepublish
Implementation and achievements of housing development programs in

Indonesia.

Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA

PERIZINAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Buku ini, disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 3 tahun di berbagai kawasan Ekowisata di Jawa Barat. Penelitian itu sendiri berawal dari suatu pertanyaan tentang kesiapan Jawa Barat yang sangat dekat dengan Ibukota Jakarta terhadap pengembangan Ekowisatanya. Dari buku ini dapat diketahui bahwa untuk mengembangkan suatu ekowisata tidak hanya cukup dengan keindahan alam serta budayanya, tetapi kesiapan masyarakat untuk menerima wisatawan, ada rasa percaya antar sesama, kepedulian dengan lingkungannya, kesiapan untuk berjejaring dan sebagainya.
M Faishal Aminuddin
Penulis : Siti Sundari
Rangkuti Penerbit : Airlangga University Press
ISBN : 978-602-0820-23-1
Tahun terbit : 2015
Bahasa : Indonesia
Sampul : Softcover
Ukuran : 15,8 x 23 cm
Jumlah halaman : xxvi,
453 hlm Sinopsis Hukum

Lingkungan mengalami perkembangan dan dinamika yang luar biasa, terutama dari aspek internasional dan global, sehingga senantiasa perlu dicermati secara nasional. Terlebih lagi, tanggal 20-22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brazil telah diselenggarakan The United Nations Conference on Sustainable Development dengan hasil The Future We Want yang juga dihadiri Indonesia. Dengan demikian Indonesia perlu menerapkan secara konsisten hasil tersebut dalam perangkat hukum nasional. Pada tanggal 3 Oktober 2009 telah berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diharapkan mampu menampung kritik-kritik terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya, tanggal 23 Februari 2012 telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam rangka Capacity building of environmental law perlu ditingkatkan kemampuan analitik untuk menemukan

kesamaan persepsi di bidang Hukum Lingkungan demi mewujudkan undang-undang yang berkelanjutan (Sustainable legislation).

Ekonomi Lokal Penerbit Andi

Pencemaran, perusakan dan pengurusan lingkungan di Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ada pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh murka alam, ada juga karena ulah manusia yang serakah. Kebakaran hutan di Sumatera tahun 2015 yang sangat hebat, yang asapnya sampai melintas ke Negara tetangga, mengakibatkan banyak korban akibat penyakit pernafasan. Belum terhitung kerusakan lingkungan yang meluas. Hal itu terjadi karena tindakan pencegahan tidak dilakukan, dan usaha pemadaman api juga tidak efektif. Hal itu terjadi karena kita selalu bangkit setelah terjadi peristiwa, selalu bersikap reaktif. Kelemahan terbesar bangsa Indonesia, ialah kurang dapat berpikir futuristik. Penanggulangan lingkungan harus dipikirkan beberapa tahun sebelum terjadi hal yang

mungkin akan mengurangi mutu lingkungan. Kelengkapan perundang-undangan pun harus diciptakan, penegak hukum harus terampil, terlatih dan berdedikasi. Sangat disayangkan gugatan perdata terhadap mereka yang dipandang bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Sumatera diputus ditolak oleh Pengadilan Negeri dengan alasan tidak masuk akal. Kita misalnya, terlalu sibuk dengan pemberantasan korupsi, kurang memperhatikan lingkungan yang terus merosot mutunya. Banyak proyek yang tidak dilengkapi dengan AMDAL, seperti reklamasi pantai Jakarta, kereta api cepat dst.

Elex Media Komputindo

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Anggota KAHMI sesuai dengan bidang keilmuan. Buku ini menginspirasi pembaca karena terdiri dari beberapa keilmuan yang beraneka sehingga memperkaya isi buku. Buku ini diharapkan dapat memotivasi dan bermanfaat bagi pembaca.

Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Lingkungan yang baik

akan memberikan dampak yang baik bagi manusia. Karena, manusia secara aktif dapat mengelola dan mengubah lingkungan sesuai dengan yang dikehendaki, meskipun demikian yang menjadi sasaran utama adalah kelestarian lingkungan yang menyehatkan. Banyak peristiwa menunjukkan kurangnya pengertian masyarakat akan hubungan interaksi manusia dengan lingkungan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa sumber daya kehidupan yang terdiri dari air, udara, makanan/flora-fauna, tanah dan lingkungan sosial telah banyak mengalami kerusakan, di mana 60% kerusakannya diakibatkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, perlu segera diambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan dan mengelola perilaku masyarakat agar kehidupan yang selalu sehat dapat terus terjaga. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah pendidikan perilaku mencintai lingkungan. Selain sekolah, pendidikan perilaku mencintai lingkungan bisa diterapkan dalam keluarga. Perilaku sehat

tidak cukup hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, paling sedikit 80% dari masyarakat harus ikut serta menjalankan hal tersebut, bila tidak demikian penularan penyakit tentunya dapat terjadi melalui berbagai media lingkungan. Dengan demikian partisipasi total masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Uraian dari book chapter ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kesehatan lingkungan. Mudah-mudahan buku ini dapat dipergunakan sebagai salah satu literatur bagi mahasiswa, pendidik, keluarga, masyarakat, dan orang-orang yang sedang atau tertarik untuk mempelajari kesehatan lingkungan

Membangun Desa Wisata Bagian 3: Pengelolaan Desa Wisata Penerbit NEM Madrasah saat ini menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat sebagai tempat belajar putra-putrinya. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI, salah satunya adalah membangun Madrasah Model dengan berbagai

keunggulan. Program unggulan dirancang mulai dari input, proses dan output. Berbagai komponen dan unsur saling terkait dan bersinergi guna mewujudkan lulusan Madrasah Model yang kompeten dan unggul dalam berbagai bidang keilmuan. Buku yang ditulis oleh Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan ini mengkaji Kebijakan Mutu Pendidikan dalam Pengelolaan MTsN Model. Analisis terhadap manajemen mutu yang diterapkan dalam Madrasah Model dijelaskan secara rinci dan sistematis. Penulis buku ini juga melakukan analisis dengan mengintegrasikan antara ilmu manajemen mutu dengan nilai-nilai Islam, sehingga terwujud integrasi keilmuan dan keislaman. Dr. Sururin, M.Ag. (Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Hadirnya Madrasah Model menjadi jawaban atas adanya kebutuhan masyarakat terhadap Madrasah yang berkualitas. Selama ini Madrasah masih sering dianggap sebagai second class dalam sistem pendidikan. Buku ini

memberi perspektif baru tentang sistem pengelolaan madrasah yang ideal berbasis pada Quality Manajement yang implementatif. Penulis berhasil menarasikan teori yang rumit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dibaca. Buku ini penting untuk dibaca oleh para pemangku kebijakan pendidikan, praktisi pendidikan, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum. Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini, semoga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan mutu Madrasah di Indonesia. Prof. Dr. Aan Hasan, M.Ed. (Guru Besar Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Buku tentang Konsep Kebijakan Mutu Pendidikan dalam Pengelolaan MTsN Model yang ditulis oleh M. Sugeng Sholehuddin merupakan tulisan yang sangat komprehensif dan klir dalam menggambarkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh MTsN Model, khususnya dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBS). Dengan hadirnya buku ini maka stereotip tentang Madrasah sebagai lembaga pendidikan

“kelas dua” menjadi terbantahkan. Prof. Dr. Sri Sumarni (Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Buku yang ada di tangan pembaca ini mengeksplorasi sejauh mana pengembangan mutu dan Quality Management pendidikan madrasah model. Dengan demikian buku ini tepat dibaca bagi kepala madrasah, guru, dan siapapun yang mendambakan madrasah model agar bisa lebih berkualitas, maka saya selaku Guru Besar Pendidikan Islam IAIN Salatiga menyambut senang hati atas terbitnya buku yang ditulis oleh Dr. H. M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag sebagai dosen dan Dekan FTIK IAIN Pekalongan. Selamat Membaca! Prof. Dr. Mansur, M.Ag. (Guru Besar Pendidikan Islam IAIN Salatiga) Buku ini cocok sebagai sumber rujukan karena di dalamnya banyak terdapat informasi yang berkaitan dengan masalah kebijakan publikasi dalam pendidikan, identifikasi masalah filosofi lahirnya madrasah model, formula kebijakan Kemenag RI dalam pengelolaan MTs, serta kinerja dan

pengembangan mutu pendidikan formal MTs. Buku ini meluruskan atau membenarkan masalah dan asumsi yang ada di khalayak umum mengenai madrasah model. Deskripsi materi dalam buku ini dibuat secara terperinci sehingga mudah untuk dipahami oleh semua pihak. Terdapat tabel dan skema untuk mengklarifikasikan materi tertentu sehingga memperjelas pembaca. Hubungan antarparagraf saling berkaitan. Buku ini bagus dan layak dikonsumsi oleh mahasiswa, praktisi pendidikan, serta siswa di seluruh Indonesia. Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M. Pd.I (Guru Besar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) *Environmental Law Enforcement* Zahir Publishing Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kemenangannya menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Lebih lanjut menurut Presiden, terdapat 5 (lima) hambatan investasi di Indonesia selama ini yaitu masalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak jelas, masalah

perpajakan, masalah perizinan, masalah ketersediaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan dan penggabungan beberapa peraturan sekaligus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan memangkas peraturan-peraturan dan birokrasi yang dinilai tidak efektif, tidak efisien dan high cost. Adapun kebijakan omnibus law terdiri dari dua isu utama yaitu omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan. Menurut pemerintah Setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang omnibus law cipta lapangan kerja terdapat 11 klaster kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3)

Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (OLCLK) yang dirancang oleh pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa omnibus law tersebut adalah misi ambisius pemerintah untuk meningkatkan investasi negara dengan menguntungkan pihak pengusaha besar tanpa memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan dan sosial lainnya. Adanya omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan berbagai kebijakan dan aturan diantaranya aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tentang reforma agraria khususnya tentang tata guna tanah, ketentuan perizinan, dan sebagainya. Belum tuntasnya pembahasan tentang omnibus law tersebut diperparah dengan kondisi dunia yang semakin tidak menentu hari ini akibat

pandemi covid-19. Pandemi telah merubah tananan seluruh manusia, termasuk juga negara-pemerintah yang hari ini disibukkan dengan kebijakan untuk mengatasi pandemi. Kebijakan Omnibus law saat ini juga dipaksa untuk menyesuaikan dengan era baru pandemi yang disebut new normal. **Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi dan Dampak Kunjungan Wisata** Media Nusa Creative (MNC Publishing) Pengembangan pariwisata alternatif dalam bentuk desa wisata, secara substansial pengembangannya senantiasa berbasis pada pemberdayaan masyarakat (community-based tourism development) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pengembangan desa wisata sebagai salah satu produk pariwisata yang berbasis pada masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata di desanya. Keberhasilan pengembangan desa wisata di suatu daerah akan sangat ditentukan

oleh potensi daya tarik pariwisata yang harus dimiliki desa tersebut. Salah satu konsep yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adat (indigenous tourism) yang sesuai dengan konsep desa wisata di suatu daerah adalah elemen "4H" yang meliputi (1) habitat (tempat permukiman asli), (2) history (sejarah/asal usul), (3) handicraft (barang kerajinan tangan), dan (4) heritage (warisan/pusaka budaya). Pembahasan dalam buku ini penulis mengangkat kasus mengenai pengembangan pariwisata alternatif Desa Pakraman Jasri. Di desa ini tentu banyak hal menarik yang perlu dikaji salah satunya mengenai tentang pengembangan pariwisata alternatifnya karena pada dasarnya desa ini terletak di Bali yang tentu sudah sangat terkenal dengan wisatanya yang begitu menawan dan sayang untuk di lewatkan. *Dimensi paradigma politik hukum pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil : Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat* Penerbit

<p>Alumni Buku ini hadir memberi cara pandang yang secara jelas ingin mengatakan pada khalayak bahwa pengelolaan hutan perlu perubahan mendasar. Dan, perubahan tersebut dapat dilakukan dengan memercayai rakyat mengelola hutan —Budiman Sudjatmiko, M.Sc; M. Phil, Anggota DPR RI Membaca karya ini akan bisa memprovokasi pembaca untuk memikirkan dan mengusahakan bagaimana situasi “Hutan</p>	<p>Kaya, Rakyat Melarat”, seperti yang ditulis oleh Peluso, bakal bisa menuju “Hutan Subur, Rakyat Makmur” —Noer Fauzi Rachman, Ph.D, Peneliti Politik Agraria dan Gerakan-gerakan Rakyat Pedesaan Buku ini menjadi salah satu referensi penting bagaimana disiplin Administrasi Publik membedah persoalan hubungan hutan-rakyat tersebut. —Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo; Pengajar pada Fakultas</p>	<p>Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI, Anggota WG Tenure dan Presidium Dewan Kehutanan Nasional Ini adalah kesaksian Barid betapa hutan bagi masyarakat tani adalah hidup itu sendiri. Hutan tidak hanya soal sumber penghidupan, juga menjadi akar dan sumber budaya, relasi manusia dan alam yang bersinergi dan berdinamika dalam nalar sejarahnya sendiri —Ahmad Ya’kub, Aktivis di Sekretariat Bina Desa</p>
--	---	--

Related with Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa:

© [Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Life Is Beautiful Parents Guide](#)

© [Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Lider En Puntos Nba Historia](#)

© [Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Libre 3 User Guide](#)